

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Letak geografis perairan Indonesia yang strategi berada diantara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Pasifik-Hindia) serta merupakan penghubung Blok Barat (Eropa) dan Blok Timur (Asia), menjadikan perairan Indonesia banyak dilintasi kapal asing. Namun dengan posisi geografis yang strategis ini tidak hanya memunculkan keuntungan bagi Indonesia tetapi juga dihadapkan berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Berbagai ancaman yang muncul ini terfokus pada keamanan maritim. Maka keamanan maritim menjadi aspek penting yang menjadi perhatian Indonesia.

Keamanan laut atau *Maritime Security* merupakan bagian dari *security* secara tradisional. Perubahan mendasar tatanan politik internasional setelah berakhirnya Perang Dingin memaknai konsep keamanan (*security*) menjadi lebih luas ruang lingkungannya. Secara tradisional pemikiran keamanan identik dengan tujuan maupun penggunaan kekuatan atau persaingan melalui kapabilitas militer dalam menghadapi suatu ancaman dari negara lain yang mengancam kedaulatan negaranya. Melihat negara lain yang berpotensi sebagai ancaman dianggap musuh yang harus dilawan dengan menggunakan kekuatan persenjataan. Sehingga pemikiran (*security*) keamanan secara konvensional lebih didominasi oleh dimensi kekuatan militer untuk berperang. *Security* secara tradisional dapat dipahami sebagai pertahanan diri (*survival*) dalam menghadapi suatu ancaman yang nyata (*existential threat*) dan sebagai justifikasi negara untuk mengatasinya. Dengan melihat akibat ancaman laut, dapat menimbulkan permasalahan di berbagai dimensi kehidupan, haruslah segera diatasi melalui koordinasi yang tepat dan peningkatan kerjasama internasional yang efektif.

Ancaman keamanan maritim di Indonesia berkaitan dengan kemunculan keamanan non-tradisional yang bersifat asimetris. Meningkatnya ancaman non-tradisional yang berasal dari dalam negara (*internal*) maupun luar negara (*external*), khususnya melalui jalur laut Indonesia, menuntut Indonesia lebih

berperan aktif dalam patroli pengawasan, pencegahan dan pengamanan dari berbagai bentuk potensi konflik seperti *transnational crime*. Dalam hal ini, ancaman non tradisional mengarah pada *transnational crime* yang salah satunya menjadi perhatian serius pada masalah keamanan maritim yaitu pembajakan dan perampokan bersenjata (*piracy and armed robbery against ships*).

Isu keamanan maritim dalam hal ini keamanan non-tradisional yang berupa pembajakan dan perompakan bersenjata menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian Indonesia. Menurut data dari IMB mulai dari tahun 2010-2014, angka tindak kejahatan pembajakan dan perompakan terus meningkat di Indonesia. Posisi geografis perairan Indonesia yang strategis serta tingginya intensitas roda perekonomian yang ditandai dengan adanya penggunaan media laut sebagai alur perlintasan perdagangan internasional yang ramai dilalui oleh kapal-kapal asing. Maka dengan melihat kondisi Indonesia sebagai salah satu Jalur perdagangan dunia menjadikan Indonesia harus menjaga keamanan maritimnya. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk kepentingan stabilitas keamanan maritim Indonesia tetapi juga keselamatan kapal-kapal asing yang melintasi Indonesia. Maka Indonesia memerlukan strategi keamanan maritim dalam menanggulangi tindak kejahatan pembajakan dan perompakan.

Strategi keamanan maritim Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Strategi yang dilaksanakan berbeda-beda sesuai pada tingkat domestik, regional dan internasional. pada tingkat domestik, Strategi yang dimiliki Indonesia yaitu dengan terkoordinasikannya antar Institusi yang terkait keamanan laut. Intitusi keamanan laut yang dimiliki Indonesia mempunyai peranan dan tugasnya masing-masing dalam menjaga keamanan laut oleh karena itu tetap perlu saling terkoordinasi untuk menyesuaikan porsi dalam menjalankan perannya dan wewenangnya dalam pelaksanaan tugas. Kemudian strategi Indonesia yang lain pada tingkat domestik yaitu dengan adanya peran dan tugas masing-masing pada institusi terkait keamanan laut, maka setiap Institusi tersebut memiliki strategi masing-masing dalam menjalankan peran dan tugasnya. Dalam hal ini terdapat tiga Institusi yaitu barkokamla yang berstrategi dengan mengkoordinasikan antar Institusi dalam pelaksanaan keamanan laut, polair yang menjaga keamanan laut bagian dalam dan melaksanakan penyidikan dan penindakan atas kejahatan dilaut

berstrategi dengan melakukan patroli dan menempatkan kapal kapan sebelas titik hotspot yang rawan, terakhir yang itu TNI AL yang bertugas untuk menjaga keamanan laut bagian terluar atau perbatasan berstrategi dengan grand strateginya yang dituangkan dengan doktrin Eka Sasana Jaya.

Pada tingkat regional, strategi keamanan maritim Indonesia yaitu dengan menjadi kerjasama dengan negara-negara dikawasan regional dan ikut bergabung dalam ASEAN Maritim Forum. Kerjasama dengan negara-negara tetangga yang berada disatu kawasan regional diperlukan Indonesia. Hal ini dikarenakan perbatasan laut yang tidak pasti diperlukan untuk saling menjaga keamanan laut dalam melaksanakan patroli disekitar laut teritorial masing-masing. Oleh karena itu Indonesia menjalin kerjasama dengan Singapura dan Malaysia yaitu operasi malsindo atau *Malacca Sea Straits Patrol* (MSSP). Kemudian keikutsertaan Indonesia sebagai anggota AMF dikarenakan Indonesia mendapat arahan mengenai perancangan strategi keamanan maritimnya.

Pada tingkat Internasional, strategi keamanan maritim Indonesia yaitu dengan menjadi kerjasama dengan negara-negara diluar dikawasan regional dan ikut bergabung dalam IMO. Dengan Indonesia yang bergabung menjadi anggota IMO memiliki tanggung jawabnya dalam keikutsertaannya yaitu sebagai Coastal State (Negara Pantai), Port State (Negara Pelabuhan) dan Flag State (Negara Bendera). Kemudian strategi lainnya yaitu dengan menjalin kerjasama dengan negara diluar kawasan yaitu Jepang. Kerjasama itu dengan Jepang telah memutuskan untuk memberikan bantuan hibah sejumlah 1.921 juta (sekitar US\$ 17,24 juta atau Rp 159,6 miliar) kepada Republik Indonesia dalam rangka proyek pembangunan Kapal-kapal Patroli. Bentuk lain kerjasama jepang yaitu dengan memberikan kapal-kapal Jepang untuk melakukan patroli dikawasan perairan Indonesia.

IV.2 Saran

Strategi keamanan maritim yang dimiliki Indonesia diperlukan beberapa faktor yang menunjang untuk meningkatkan pelaksanaan dari strategi yang telah disusun. Beberapa faktor penunjang yang bisa meningkatkan strategi keamanan maritim Indonesia yaitu diperlukan perlengkapan yang lebih memadai. Dalam hal

ini perlengkapan seperti kapal-kapal patroli yang lebih canggih untuk menyesuaikan perkembangan teknologi kapal lain pada saat pengejaran kapal lain. Selain itu faktor penunjang perlengkapan lainnya yaitu diperlukannya radar yang lebih memadai untuk lebih cepat dalam mendeteksi kapal asing yang masuk kedalam wilayah yuridiksi Indonesia. Hal ini dapat mempermudah institusi yang terkait dalam keamanan laut dalam menindak kejahatan pada wilayah perairan Indonesia.

Faktor penunjang lainnya yaitu diperlukannya peraturan perundangan yang lebih jelas untuk mempertegas kejelasan hubungan antar institusi yang terkait keamanan laut di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih adanya tumpang tindih tindakan dalam pelaksanaan keamanan laut oleh Institusi yang berwenang. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas mengatur keterkaitan antar Institusi dapat mempermudah dalam perencanaan, aksi tindakan serta penyidikan dalam menanggapi isu keamanan maritim.

